

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROMOSI POTENSI WISATA PEMANDIAN LOMBONGO KABUPATEN BONE BOLANGO

Siti Anisa Sumaga¹, Yacob Noho Nani², Romy Tantu³

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: sitianisasumaga@gmail.com¹, yacobnani@ung.ac.id²,
romytantu@ung.ac.id³.

ABSTRAK

Promosi dapat mempengaruhi pengembangan potensi wisata, pelaksanaan implementasi kebijakan promosi yang optimal dapat meningkatkan jumlah kunjungan pada suatu objek wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Promosi Potensi Wisata Pemandian Lombongo Kabupaten Bone Bolango. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yakni implementasi kebijakan promosi potensi wisata pemandian Lombongo Kabupaten Bone Bolango dapat dikatakan belum maksimal. Berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, dari segi faktor komunikasi yaitu kurangnya kejelasan penyampaian informasi untuk promosi wisata, faktor sumber daya baik berupa SDM, SDA maupun fasilitas yang tersedia untuk promosi belum optimal pemanfaatannya, dan faktor disposisi/sikap pelaksana juga perlukan adanya pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi penggunaan media promosi. Serta dari segi struktur birokrasi sudah terdapat tupoksi yang mengatur tanggung jawab masing-masing kelompok kerja di Wisata Pemandian Lombongo Kabupaten Bone Bolango.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Promosi, Potensi Wisata.*

ABSTRACT

Promotion can influence the development of tourism potential, and the optimal implementation of promotional policies can increase the number of visits to a tourist attraction. The study aims to investigate how promotional policy for the tourism potential of Lombongo Hot Springs in Bone Bolango Regency is implemented with a focus on the following research question: How is the promotional policy designed and implemented? What are the key factors influencing the effectiveness of the promotional policy? And what are the areas that require improvement?. The study employs a descriptive qualitative methodology, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Data analysis is conducted through data reduction, presentation, verification, and conclusion-drawing stages. The findings indicate that the

implementation of promotional policy for Lombongo Hot Springs in Bone Bolango Regency has not yet been maximized. Based on the succes factors for policy implementation outlined by Edward III, Communication faktors such as the lack of clarity in delivering promotional information, resource factors including human resources, natural resources, and promotional facilities, and the attitude of the implementers, who need ongoing training to enhance their competency in using promotional media, are areas that require improvment. Regarding bureaucratic structure, each working group has roles and responsibilities related to Lombongo Hot Springs in Bone Bolango Regency.

Keywords: *Implementation, Policy, Promotion, Tourism Potential*

PENDAHULUAN

Setiap provinsi di Indonesia menawarkan jenis pariwisata yang berbeda-beda; Provinsi Gorontalo, misalnya, memiliki sumber daya alam dan budaya yang melimpah, sehingga menjadikannya kandidat utama untuk dikembangkan dan dipelihara sebagai tujuan wisata. Ada satu kota (Kota Gorontalo) serta 5 kabupaten di Provinsi Gorontalo. Kabupaten Bone Bolango adalah salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang mempunyai potensi signifikan untuk pengembangan pariwisata. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya yang melimpah ini guna berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Mempromosikan pariwisata merupakan tujuan utama pemerintah dalam berbagai kebijakan pembangunan. Setelah infrastruktur, transportasi laut, energi dan pangan, pemerintah menetapkan sektor pariwisata menjadi prioritas kelima dalam penyusunan rencana aksi pemerintah. Pemerintah telah merancang beberapa program untuk mengembangkan sektor pariwisata.

Pengelolaan pelabuhan dan pengembangan produk pariwisata, promosi pariwisata, pengembangan usaha pariwisata, promosi pariwisata, pengembangan usaha pariwisata dan struktur usaha sebagai bagian dari pengembangan pariwisata Indonesia dalam pengembangan pariwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan pada Pasal 25 ayat f tentang kewenangan penyediaan fasilitas juga promosi destinasi pariwisata serta produk wisata yang berada di wilayah kabupaten merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan promosi pariwisata. Dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan, promosi pariwisata merupakan suatu strategi pemasaran yang digunakan untuk memperkenalkan daya tarik wisata, mengedukasi atau mengiklankan manfaat atau daya tarik suatu wisata, serta mengajak wisatawan untuk berkunjung ke lokasi wisata.

Selain itu, tujuan dari pemasaran ini adalah untuk meyakinkan calon

wisatawan untuk mengunjungi objek wisata dengan menyebarkan pengetahuan tentang potensi berbagai sumber daya. Salah satu daerah dengan potensi pariwisata terbesar adalah Kabupaten Bone Bolango, yang menerbitkan kebijakan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 pada Pasal 8 Ayat 1 dan 2 masing-masing tentang potensi objek wisata alam dan budaya.

Potensi besar yang dimiliki suatu objek wisata perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah salah satunya yaitu Wisata Pemandian Lombongo. Wisata ini terkenal dengan air panas dari kawah vulkanik. Pemandian ini dikelilingi oleh hutan lebat yang menyuguhkan pemandangan alam yang asri, udara dingin dan air hangat dengan menikmati pemandangan hutan hujan tropis alami



Gambar 1. 1 Wisata Pemandian Lombongo 2024

Sumber: hasil observasi, 2024.

Dalam melakukan pengembangan wisata Lombongo, pemerintah daerah membuat program-program promosi untuk memasarkan wisata sehingga dapat menarik minat pengunjung. Semakin menarik suatu wisata yang di promosikan, semakin banyak pengunjung yang berkeinginan untuk datang ke tempat wisata yang telah dipromosikan.

Tabel 1 Data pengunjung wisata Pemandian Lombongo Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020-2023

Data Pengunjung Wisata Pemandian Lombongo		
Tahun	Wisatawan Lokal	Wisatawan Manca Negara
2020	7.845	0
2021	16.495	0
2022	8.693	30
2023	4.228	0
Jumlah	37.261	30

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango, 2024.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung di wisata Pemandian Lombongo Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 7.845 orang yang keseluruhannya merupakan wisatawan lokal, kemudian mengalami peningkatan wisatawan lokal pada tahun 2021 sebanyak 16.495 orang. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan wisatawan lokal

menjadi 8.693 orang dan wisatawan manca negara naik menjadi 30 orang. Dan pada tahun 2023 turun menjadi 4.228 wisatawan lokal.

Menurunnya jumlah wisatawan berdasarkan data jumlah pengunjung wisata pemandian Lombongo pada tahun 2022 dan tahun 2023 ini menunjukkan bahwa promosi yang dilakukan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting untuk mengembangkan wisata secara maksimal. Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti mendapatkan beberapa masalah yang terjadi seperti sumber daya manusia yang kurang optimal dalam melakukan aktivitas promosi wisata, keterbatasan anggaran dalam penyediaan sarana prasarana, dan hambatan birokrasi terkait kewenangan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya. Apabila dalam pelaksanaan kebijakan promosi potensi wisata mendapat hambatan baik dari pemerintah daerah, pengelola wisata, maupun pengunjung, dapat mempengaruhi jumlah pengunjung yang akan berwisata ke objek wisata pemandian Lombongo. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori Edward III dengan 4 (empat) faktor sebagai penentu keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan promosi potensi wisata pemandian Lombongo Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut terkait

permasalahan promosi wisata pemandian Lombongo dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, dengan mengambil judul penelitian "Implementasi Kebijakan Promosi Potensi Wisata Pemandian Lombongo kabupaten Bone Bolango".

KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Tindakan pemerintah dicirikan sebagai "kebijakan" dalam arti luas dan sempit; dengan demikian, ia adalah "kebijakan publik" (kebijakan pemerintah, kebijakan umum, kebijakan negara). Menurut PBB, kebijakan lebih tepat didefinisikan sebagai "pernyataan arahan dasar untuk tindakan, tindakan tertentu, program kegiatan tertentu, atau rencana." "Pernyataan arahan dasar untuk tindakan, tindakan tertentu, program kegiatan tertentu atau rencana" adalah bagaimana PBB (1975) mendefinisikan kebijakan.

Selain itu, kebijakan publik mengacu pada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang menjadi aturan yang mengikat secara hukum (Chaizi Nashuca, 2004). Untuk merumuskan kebijakan yang mendorong hubungan sosial yang harmonis, kebijakan tersebut berupaya untuk mengasimilasi dinamika sosial dalam masyarakat.

Dalam membedakannya, Anderson (dalam Agustino, 2017) menggolongkan kebijakan publik sebagai suatu pengaturan kegiatan

dengan alasan tertentu yang dilaksanakan sebagai reaksi terhadap suatu isu atau pokok bahasan yang sedang dipertimbangkan oleh seorang pelaku atau kelompok. Cara lain untuk melihat pendekatan tersebut adalah sebagai suatu kerangka kerja. Suatu kerangka kerja terdiri dari beberapa komponen yang dilarang dan saling terkait yang bekerja sama di bawah aturan-aturan tertentu untuk menciptakan suatu keseluruhan.

Dari beberapa penjabaran para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan pengaturan terbuka dapat menjadi suatu pilihan yang dibuat oleh suatu organisasi pemerintah untuk mengatasi berbagai isu yang muncul dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup warga negara. Oleh karena itu, pendekatan tersebut memegang peranan penting dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat dijelaskan secara etimologis sebagai suatu tindakan yang melibatkan penggunaan alat atau cara untuk menyelesaikan tugas guna memperoleh hasil yang diinginkan. Sedangkan implementasi, menurut Nurdin Usman (2002:70), didasarkan pada kegiatan, latihan, atau keberadaan komponen kerangka kerja; bukan sekadar suatu gerakan, tetapi suatu tindakan terencana yang bertujuan untuk mencapai sasaran gerakan.

Menurut konsep implementasi yang diberikan di atas dalam kaitannya

dengan kebijakan, khususnya dalam kaitannya dengan kebijakan, implementasi kebijakan mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Jika definisi implementasi sebelumnya dikaitkan dengan kebijakan, maka implementasi tidak akan dimulai sampai tujuan dan sasaran kebijakan ditetapkan.

Lebih lanjut, kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan dalam keputusan-keputusan terdahulu oleh Van Metter dan Van Horn (1974) disebut sebagai implementasi kebijakan. Langkah-langkah ini mencakup semua upaya untuk mengubah pilihan-pilihan menjadi langkah-langkah operasional dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau semua upaya untuk secara terus-menerus membawa perubahan-perubahan kecil atau besar melalui pilihan-pilihan politik dari para spesialis publik.

Menurut model implementasi Edward III (dalam Sawir 2021) untuk pengaruh langsung dan tidak langsung implementasi, terdapat empat (4) faktor kunci yang secara signifikan mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan, yaitu:

- a. Komunikasi, Komunikasi yang efektif memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan penerapan kebijakan publik. Ketika para pengambil keputusan memiliki pengetahuan tentang apa yang

mereka lakukan, keputusan dapat diterapkan secara efektif. Setiap pilihan dan penggunaan tatanan yang dijalankan harus dikomunikasikan (atau diinformasikan) kepada orang yang tepat sehingga mereka tahu apa yang mereka lakukan, jika komunikasi berhasil. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu; transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

- b. Sumber Daya, Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan, jika pelaksana kebijakan kekurangan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam implementasi, maka kebijakan implementasi kebijakan sulit dilakukan.
- c. Disposisi/ Sikap Pelaksana, Pengimplemtasi kebijakan membutuhkan sikap dan kecenderungan yang positif dari seluruh pihak yang terkait untuk menerima tujuan dari kebijakan, sehingga kebijakan dapat dilaksanakan dengan optimal.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur adalah kerangka organisasi yang merupakan visualisasi dari tugas, fungsi, garis kewenangan dan tanggung jawab, jabatan dan jumlah pejabat seta batas-batas

formal dalam hal apa organisasi itu beroperasi.

3. Promosi Pariwisata

Promosi merupakan salah satu komponen terpenting dalam bauran promosi dalam memasarkan jasa. Selain berfungsi sebagai saluran komunikasi antara pedagang dan konsumen, promosi memiliki kemampuan untuk meyakinkan konsumen agar membeli barang atau menggunakan jasa sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu digunakan instrumen khusus. Seperti yang dijelaskan oleh Lupiyoadi (2013: 178).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan pada Pasal 1 Ayat 29 terkait Promosi Pariwisata adalah kegiatan memberitahukan produk atau jasa yang hendak dijadikan target pasar.

Lebih lanjut Gromang dalam (Novalina, 2013:20) Kemajuan pariwisata dimulai dari prediksi dan berkaitan dengan upaya untuk memicu kesepakatan pariwisata yang mungkin terjadi. Kemajuan pariwisata menggabungkan semua latihan yang diatur termasuk penyebaran data, promosi, film, brosur, buku panduan, uraian singkat, dan lainnya.

Promosi ialah elemen pemasaran unik yang menarik wisatawan ke lokasi wisata tertentu serta menonjolkan berbagai macam kegiatan terkait pariwisata yang dikembangkan dan dilaksanakan. Dalam hal bisnis, periklanan merupakan sarana

komunikasi yang menginformasikan, mendorong, juga mengingatkan wisatawan tentang suatu produk atau manfaat destinasi wisata yang ditawarkan kepada calon wisatawan. Hal ini memungkinkan produk tersebut menawarkan informasi atau menyiratkan bahwa produk tersebut berisi sesuatu yang bermanfaat, sehingga wisatawan dapat berkunjung di waktu dan juga lokasi yang tepat.

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa promosi pariwisata merupakan suatu cara untuk memperkenalkan potensi dan produk pariwisata yang dihasilkan oleh para wisatawan, baik dari sektor publik, sektor komersial, maupun sektor lokal, dengan menggunakan media konvensional maupun kontemporer. Potensi Pariwisata.

METODE

Penelitian dilaksanakan pada objek wisata pemandian Lombongo Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Mukhtar (2013:10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap peneliti pada suatu waktu tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer ini dapat dikumpulkan dengan dua metode, yaitu: metode observasi dan metode interview (wawancara), data primer

untuk memperoleh data dari informan. Adapun pihak yang dijadikan sebagai informan, diantaranya: pegawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga selaku lembaga yang bertanggung jawab dan Pengelola wisata pemandian Lombongo dan pengunjung wisata. data sekunder diperoleh dari riset perpustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca dan memahami teori-teori dari literatur buku, artikel, jurnal, atau data dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data, Data yang akan dikumpulkan dan dianalisa setiap meninggalkan lapangan. Menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2007) aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan promosi potensi wisata merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan permasalahan khususnya promosi wisata. Promosi merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pariwisata daerah, penyebaran informasi mengenai daya tarik wisata menyebabkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Pedoman yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan promosi potensi wisata Pemandian Lombongo Kabupaten Bone Bolango adalah dokumen Peraturan Daerah

Kabupaten Bone Bolango No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Promosi untuk wisata Pemandian Lombongo diuraikan sesuai dengan kebutuhan tempat wisata. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edwarad III, yang meliputi faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi/ sikap pelaksana, dan faktor struktur birokrasi. Hasil analisis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Komunikasi

Salah satu point terpenting dalam implementasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi atau komunikasi, komunikasi sangatlah penting. Komunikasi antara pengambil kebijakan, petugas implementasi kebijakan, dan kelompok sasaran merupakan langkah awal dalam implementasi suatu kebijakan. berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan promosi potensi wisata Pemandian Lombongo menggunakan pendekatan Top Down. Top Down merupakan bentuk komunikasi internal yang menggunakan struktur hierarki dari atasan kepada bawahan. Pendekatan top down ini sering menimbulkan miskomunikasi terkait prioritas kebutuhan dan keinginan dalam penggunaan dana pengembangan wisata Lombongo. Kesulitan lain muncul dalam hal komunikasi terkait pengelolaan promosi menggunakan media sosial, pengelola wisata Lombongo memiliki kesulitan

dalam menangkap dan memahami informasi sehingga promosi wisata melalui media sosial yang dilakukan oleh pemerintah kurang melibatkan pengelola.

Proses promosi potensi wisata pemandian Lombongo Kabupaten Bone Bolango paling banyak dan sering dilakukan melalui media sosial. Promosi melalui media sosial merupakan salah satu media yang memiliki aksesibilitas yang mudah dan terjangkau serta dapat menjangkau wisatawan dari luar daerah. Promosi melalui media sosial membutuhkan kejelasan informasi yang akurat, akan tetapi dalam promosi yang dilakukan pada objek wisata pemandian Lombongo masih kurang lengkap terhadap daya tarik dan fasilitas yang di pasarkan, serta promosi yang dilakukan tidak secara berskala atau terus menerus sehingga beberapa bentuk promosi sudah tidak update lagi sesuai dengan yang ada dilapangan.

Berdasarkan hal tersebut bahwa komunikasi dalam hal kejelasan informasi harus lebih ditingkatkan sehingga dapat menghindari terjadinya miskomunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa serta masyarakat dan pengelola wisata. Dua hal yang perlu ditekankan dalam pelaksanaan komunikasi menurut Edward III adalah konsistensi dalam penyampaian informasi dan kejelasan informasi yang disampaikan. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam

implementasi kebijakan promosi potensi wisata pemandian Lombongo Kabupaten Bone Bolango belum berjalan baik, karena penyampaian informasi yang kurang jelas, perbedaan kemampuan implementator dalam mengkap dan memahami informasi yang disampaikan juga berbeda.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu syarat keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Menurut George C. Edwards III, meskipun komunikasinya sudah jelas dan seimbang, implementasi kebijakan bisa sulit dilakukan jika tidak ada ketersediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tindakan implementasi kebijakan.

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa wisata pemandian Lombongo Kabupaten Bone Bolango kaya akan sumber daya alam menjadi daya tarik wisata untuk dipromosikan, pemanfaatan sumber daya alam dalam pelaksanaan proses promosi menjadi salah satu faktor penting. Akan tetapi, ketersediaan sumber daya manusia yang masih kurang sangat mempengaruhi pelaksanaan promosi. Hal ini menyebabkan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango melakukan upaya pengoptimalan kinerja staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, tetapi upaya ini dinilai kurang maksimal karena membebani kinerja pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan

kemampuan potensialnya, sehingga berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang menjadi tidak efektif. Pelaksanaan promosi yang kurang melibatkan pihak lain juga menjadi salah satu faktor kurang efektifnya kebijakan ini. Kurangnya keterlibatan pihak lain dalam promosi wisata dilatar belakangi oleh keterbatasan anggaran sehingga menyebabkan keterbatasan opsi pilihan dalam melakukan promosi di wisata pemandian Lombongo.

3. Disposisi/ Sikap Pelaksana

Disposisi merupakan, sikap, kemauan dan komitmen pihak pengambil kebijakan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh George C. Edwards III diidentifikasi sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan, karakter mereka yang mempunyai kekuasaan untuk mengimplementasikan kebijakan mempengaruhi kinerja kebijakan, karena artinya melaksanakan kebijakan berdasarkan pada sikap, kebutuhan dan keinginan. Semakin efektif implementasi kebijakan maka semakin besar pula peluang sukses implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sikap pelaksanaan dalam melakukan promosi kurang dalam memberikan informasi terhadap daya tarik wisata. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Pasal 18 bahwa setiap wisatawan berhak

memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata. Berdasarkan kebijakan ini sikap pelaksana yang lebih mengandalkan penyebaran informasi dari pengunjung yang memposting pengalamannya ke sosial media ataupun menceritakan secara langsung dari mulut ke mulut, serta penggunaan media sosial sebagai salah satu media yang paling banyak digunakan dalam melakukan promosi menyebabkan penyampaian informasi yang kurang akurat mengenai daya tarik wisata yang dapat mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung.

Disisi lain, promosi potensi wisata pemandian Lombongo Kabupaten Bone Bolango terdapat kendala dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango yang kurang untuk melakukan implementasi kebijakan promosi, sehingga untuk pelaksanaan promosi di wisata Lombongo belum berjalan optimal. Hal ini juga dipengaruhi oleh pengelola wisata yang kurang kompetensi dalam menggunakan sosial media sebagai salah satu bentuk sarana promosi yang dilakukan, sehingga beberapa program promosi melalui media tidak berkelanjutan. Kendala lainnya juga disebabkan kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya (fasilitas) oleh pengelola wisata dalam promosi, kurangnya inisiatif dari pengelola wisata, sehingga seringkali pengelola wisata menunggu arahan dari pemerintah daerah untuk melakukan

event yang memanfaatkan fasilitas yang ada di wisata pemandian Lombongo Kabupaten Bone Bolango.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, struktur organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bon Bolango terlihat jelas adanya visibilitas aktivitas kerja satu dengan yang lain, sehingga hubungan antar aktivitas dan fungsi menjadi terbatas. Sementara itu, dalam hal pelaksanaan kebijakan promosi potensi wisata pantai di Bon Bolango dibentuk kelompok kerja yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi yang saling berkaitan. Kewenangan pelaksanaan kebijakan pendanaan menjadi tugas pokok dinas pariwisata. Karena beratnya tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan promosi ini, maka sektor pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bon Bolango belum optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Bon Bolango secara keseluruhan. Karena biasanya pemerintah hanya fokus mempromosikan objek wisata yang sedang menjadi tren saja, maka objek wisata yang lain juga perlu dipromosikan oleh pengelolanya sendiri agar jumlah pengunjungnya meningkat tanpa kalah dengan objek wisata yang lain.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan promosi potensi wisata pemandian Lombongo Kabupaten Bone Bolango belum berjalan maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan komunikasi yang terjalin dalam hal ini koordinasi dan promosi belum bisa dikelola dengan baik. Sumber daya yang ada di wisata lombongo baik itu sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas belum maksimal pemberdayaannya. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan di wisata pemandian Lombongo belum cukup baik dalam pemanfaatan sumber daya yang ada untuk melakukan promosi wisata pemandian Lombongo. Dan struktur birokrasi yang sejauh ini sudah cukup baik dalam pembagian tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran penelitian ini adalah:

1. Dari segi komunikasi, sebaiknya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango kepada pengelola wisata bisa lebih optimal. Dalam mempromosikan wisata Lombongo pengelola lebih diperhatikan dan lebih ditingkatkan lagi agar program promosi yang dijalankan dapat berkelanjutan sehingga bisa mendukung peningkatan kunjungan wisatawan Pemandian Lombongo.

2. Pada Faktor sumber daya, sebaiknya kemampuan dalam pengelolaan wisata harus dioptimalkan lagi. Pengelola wisata membutuhkan pelatihan yang lebih intensif terhadap penggunaan sosial media untuk mempromosikan wisata pemandian Lombongo, sehingga fasilitas pendukung promosi wisata yang diberikan pemerintah daerah dapat digunakan dengan baik.
3. Dari segi disposisi/sikap pelaksana, diharapkan pemerintah Bone Bolango bisa melakukan lebih banyak pendekatan dengan pengelola wisata sehingga bisa memicu kepedulian pengelola wisata Lombongo terhadap tujuan dari kebijakan promosi potensi wisata Lombongo yang diterapkan.
4. Untuk struktur organisasi, diharapkan pemerintah lebih memperhatikan terkait ketersediaan sumber daya manusai (pegawai) yang cukup dan ahli dibidangnya dalam mempromosikan wisata daerah sehingga tidak akan ada pekerjaan yang tidak maksimal pengerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Kutipan dari Buku

- Abdussamad, H. Z., & SIK, M.S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Keban, T. Y (2019). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik*

- Konsep Teori dan Isu. *Yogyakarta. Penerbit Gava Media*
- Muhammad, D. Kurniawan, R. Rahman, B. & Iskandar, H. (2019). Pengantar Ilmu Administrasi Negara. *Unimal Press*. 978-602-464-061-3
- Pasolong. (2019). Teori Admnistrasi Publik. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaknaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Sawir, M. (2021). Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik. Konseptual dan Praktik. In *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*.
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasin* (Issue March). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Pengembangan Kepariwisata Di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(4), 1267–1280. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i4.781>

Regulasi

- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bone Bolango 2011-2031.

Kutipan dari Jurnal

- Muhammad ikhsan. (2018). Implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di kabupaten sinjai. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaknaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Tirta, N. K. P. W., Sulila, I., & Isa, R. (2023). Implementasi Kebijakan